

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak setiap anak terlahir dalam keadaan sempurna, banyak diantara mereka yang terlahir dalam keadaan tidak sempurna atau memiliki suatu kecatatan atau berasal dari keluarga kurang mampu, *broken home*, anak-anak jalanan, dan lain-lain. Anak-anak seperti itu tergolong rentan terhadap diskriminasi, marginalisasi atau pemisahan, padahal layaknya anak-anak yang normal lainnya, anak-anak inipun memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk dapat mengembangkan potensinya dan terutama untuk mendapatkan pendidikan semenjak usia dini.

PBB menjamin hak-hak anak-anak tersebut di atas. Hal ini dibuktikan dengan adanya Konvensi Hak Anak, yang didalamnya antara lain membahas mengenai hak dan kesempatan semua anak tanpa terkecuali . Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 2 yang berbunyi :

“Negara-negara Peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang ditetapkan dalam Konvensi ini dan setiap anak dalam wilayah hukum mereka tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun, tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal-usul bangsa, asal-usul etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau status lain dan anak atau dan orangtua anak atau walinya yang sah menurut hukum”.

Dengan demikian PBB menjamin semua anak agar dapat hidup dan bermasyarakat serta mendapatkan hak dan kesempatan yang sama seperti anak-anak pada umumnya, begitu pula dalam hal pendidikan. Anak-anak yang

rentan terhadap marjinalisasi tersebut berhak mendapatkan pendidikan tanpa perlakuan diskriminasi. Hal ini pun tercantum dalam Konvensi Hak Anak pasal 28, yang berbunyi :

“Negara-negara Peserta mengakui hak anak atas pendidikan, dan untuk mewujudkan hak ini secara bertahap dan berdasarkan kesempatan yang sama, Negara-negara Peserta secara khusus akan :

- (a) Membuat pendidikan dasar suatu kewajiban dan tersedia secara cuma-cuma untuk semua anak;
- (b) Mendorong pengembangan bentuk-bentuk pendidikan menengah yang berbeda, termasuk pendidikan umum dan kejuruan, menyediakan pendidikan tersebut untuk setiap anak, dan mengambil langkah-langkah yang tepat seperti penerapan pendidikan cuma-cuma dan menawarkan bantuan keuangan bila diperlukan”.

Sama halnya dengan di Indonesia, pendidikan seyogyanya merupakan hal yang mutlak bagi seluruh rakyat Indonesia dari berbagai lapisan, golongan, status sosial, dan lain sebagainya. Pendidikan merupakan hak bagi seluruh anak Indonesia tanpa terkecuali. Untuk itu anak-anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan, bahkan semenjak dini usia. Karena pendidikan yang diawali sejak usia dini merupakan hal yang penting sebagai modal suatu bangsa dalam mencapai kemajuan. Oleh karena itu dewasa ini banyak bermunculan sekolah-sekolah untuk anak usia dini, antara lain Taman Kanak-kanak, Kelompok Bermain, BKB, dan lain sebagainya. Hal tersebut membuktikan betapa perlunya anak-anak Indonesia mendapatkan pendidikan semenjak dini tanpa adanya perlakuan diskriminasi. Seperti yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia pasal 31 ayat 1, yang menyatakan, :”Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan”. Hal senada tercantum pula dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, pasal 9 ayat 1, dalam ayat

tersebut dinyatakan bahwa, “Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya”. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, maka setiap anak, termasuk di dalamnya anak-anak penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya tanpa diskriminasi.

Dalam praktek penyelenggaraan pendidikan formal di Indonesia hanya mengenal dua bentuk yaitu sekolah biasa dan sekolah luar biasa. Sekolah biasa hanya diperuntukan bagi siswa yang dikategorikan “normal”. Begitu pula dengan sekolah luar biasa yang hanya diperuntukan bagi siswa yang “berkelainan” atau “luar biasa”. Dalam pendidikan segregatif anak-anak luar biasa memperoleh pendidikan melalui Sekolah Luar Biasa yang disesuaikan dengan kelainannya. Mereka dididik secara terpisah dari anak-anak lain baik dalam belajar maupun dalam bermasyarakat. Bahkan sebagian dari mereka harus terpisah dari keluarganya, karena mereka harus tinggal di asrama yang disediakan oleh sekolah. Anak-anak akan bersosialisasi dengan anak lain yang memiliki kelainan yang hampir sama atau sejenis. Dasar pemikiran mengapa anak berkebutuhan khusus harus dilayani terpisah, adalah salah satu di antaranya, ahli pendidikan di barat berpandangan anak yang berkebutuhan khusus tidak akan mampu mengikuti pelajaran yang sama dan sebanding dengan anak normal meski pada pelajaran-pelajaran tertentu dapat melebihi anak normal. Selain itu, dengan bertemu dan bergaul dengan orang yang senasib diharapkan dapat meningkatkan motivasi, harga diri, dan kepercayaan

diri anak sehingga diharapkan akan meningkatkan gairah belajar dan gairah hidupnya.

Pendekatan segregasi ini dianggap kurang cocok karena tidak sesuai dengan tujuan akhir yaitu adanya normalisasi terhadap anak, dimana anak harus bisa bermasyarakat. Seiring dengan semakin meningkatnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dunia untuk mewujudkan pendidikan yang holistik dan dapat di akses oleh semua individu, maka diusunglah pengembangan pendidikan inklusi di seluruh belahan dunia termasuk Indonesia. Dimana setiap sekolah seyogyanya mengakomodasikan semua anak tanpa memandang kondisi fisik, intelektual, sosial, emosi, ataupun kondisi-kondisi lainnya. Konsep paling mendasar dalam pendidikan inklusi ini adalah bagaimana agar anak dapat belajar bersama dan belajar untuk hidup bersama. Saat ini pendidikan inklusi dianggap sebuah sistem yang paling cocok untuk menunjang optimalisasi kemampuan anak dari sisi pendidikan formal, walaupun pada kenyataannya penerapan sistem ini belum seutuhnya.

Pendidikan inklusi mengharuskan semua anak tanpa terkecuali untuk mendapatkan pelayanan di sekolah atau lembaga pendidikan lainnya, dalam kelas biasa bersama anak-anak lainnya dengan memperhatikan perbedaan setiap anak didik tanpa mempermasalahkan keadaan fisik, kecerdasan sosial, emosi, bahasa maupun kondisi lainnya. Pendidikan inklusi bukan semata memasukan anak berkebutuhan khusus ke sekolah umum, tetapi justru berorientasi bagaimana layanan pendidikan ini diberikan dalam rangka

memenuhi kebutuhan setiap anak dengan keunikan dan keberagamannya. Inklusi juga dapat diartikan bagaimana layanan pendidikan ini sangat berarti dalam mengembangkan potensi dan kompetensi semua anak yang berbeda-beda sehingga mereka dapat berkembang secara optimal sesuai dengan irama perkembangannya. Dengan program inklusi tersebut, anak-anak berkebutuhan khusus yang diikutkan belajar menyatu dalam satu kelas bersama murid-murid sekolah reguler, diharapkan akan memiliki rasa percaya diri. Sebaliknya, anak-anak normal teman sekolahnya sekaligus akan terdidik dan bisa belajar hidup bertoleransi antarsesama manusia.

Pada pelaksanaannya, pendidikan inklusi bukanlah sesuatu yang mudah dilaksanakan, mengingat keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki sekolah yang tentunya memerlukan sarana, program layanan pendidikan/kurikulum, sumber daya manusia, sumber daya penunjang, dan yang lainnya secara khusus. Selain itu karakter anak-anak yang berbeda, cemoohan teman, ketidakpahaman guru dalam cara mengajar anak yang berkebutuhan khusus, sarana dan prasarana khusus yang belum memadai, keterbatasan dan kemampuan dalam persaingan meraih prestasi belajar, adalah beberapa kendala yang akan dihadapi dalam program inklusi.

Berhasil atau tidaknya penerapan sistem pendidikan inklusi tergantung pada semua unsur (Pemerintah daerah, Dinas atau lembaga terkait, Pengelola Yayasan, Kepala Sekolah, guru kelas, orang tua dan lain sebagainya) yang saling berkaitan satu sama lain, terutama pemahaman gurunya itu sendiri mengenai sistem pendidikan inklusi. Pemahaman guru dalam hal ini sangatlah

penting, karena gurulah yang memiliki peranan penting dalam pembelajaran yang inklusif dan sehari-hari akan berinteraksi dengan anak-anak dengan keragaman yang dimilikinya. Dalam kelas inklusi bukan hanya anak yang belajar, tetapi gurupun dapat belajar dari keberagaman anak didiknya, selain itu gurupun harus memiliki motivasi yang tinggi untuk dapat memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik.

Dalam buku perangkat Lingkungan Inklusif Ramah terhadap Pembelajaran (LIRP, 2007) dinyatakan bahwa :

“Inklusi berarti bahwa sebagai guru bertanggung jawab untuk mengupayakan bantuan dalam menjaring dan memberikan layanan pendidikan pada semua anak yang ada di masyarakat, keluarga, lembaga pendidikan, layanan kesehatan, pemimpin masyarakat, dan lain-lain”.

Prinsip pendidikan yang disesuaikan dalam sekolah inklusi menyebabkan adanya tuntutan yang besar terhadap guru. Hal ini maksudnya, menuntut adanya pergeseran dalam paradigma proses belajar mengajar. Pergeseran besar lainnya adalah mengubah tradisi dari mengajarkan materi yang sama kepada semua anak tanpa mempertimbangkan perbedaan individual menjadi mengajar setiap anak sesuai kebutuhan individualnya tetapi dalam *setting* kelas yang sama, dari berpusat pada kurikulum menjadi berpusat pada anak dan perubahan-perubahan lainnya (Jhonsen: 2003 dalam <http://sambasalim.com/pendidikan/pendidikan-inklusi.html>). Selain itu dalam pendidikan inklusi guru dituntut untuk dapat menghargai keberagaman latar belakang anak didiknya serta kreatif dalam mencetuskan gagasan yang mendukung kebutuhan dan minat anak didiknya yang berbeda-beda. Gurupun

harus bisa mendorong anak menjadi lebih kreatif dan aktif di kelas serta menciptakan suasana pembelajaran yang ramah dan menyenangkan.

Untuk dapat melakukan itu semua, guru harus terlebih dahulu memahami hakikat pendidikan inklusi yang sebenarnya. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara mengikuti seminar/pelatihan tentang sistem pendidikan inklusi, lokakarya, atau mencoba memahami sendiri melalui buku atau internet. Namun pada kenyataannya pada pelaksanaan pembelajaran inklusi masih terdapat guru yang menggunakan cara lama atau konservatif, tidak kreatif, pasif dan monoton, karena beranggapan kelas yang baik adalah kelas yang hening. Selain itu masih ada pula pembelajaran yang diskriminatif terhadap anak-anak golongan tertentu, tentu saja ini bertentangan dengan konsep pendidikan inklusi yang menekankan bahwa semua anak memiliki hak untuk belajar tanpa dibeda-bedakan.

Kesiapan guru untuk mengembangkan pembelajaran inklusi di kelas merupakan salah satu tantangan cukup sulit yang dihadapi. Masalah-masalah yang dihadapi guru dalam pelaksanaan pembelajaran yang inklusi pada umumnya berkenaan dengan minimnya pemahaman mereka tentang pendidikan inklusi.

Minimnya pemahaman guru tentang pendidikan inklusi menimbulkan masalah pada penanganan anak, guru tidak dapat menangani dan melayani anak-anak didiknya yang beraneka ragam, sehingga masih ada guru yang belum dapat menerima anak-anak berkebutuhan khusus di kelasnya.

Mengajar anak-anak yang memiliki kemampuan heterogen memang berbeda dengan mengajar anak-anak yang memiliki kemampuan homogen. Para guru pada umumnya merasa kurang mampu mengajar anak-anak yang memiliki kemampuan heterogen di kelas inklusi karena ketika mereka sekolah/kuliah di lembaga pendidikan guru tidak dibekali dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan agar mampu untuk mengajar di kelas inklusi (Sumber, www.ditplb.or.id).

Masalah lain yang dihadapi oleh guru dalam pelaksanaan pembelajaran inklusi adalah minimnya sarana penunjang sistem pendidikan inklusi, terbatasnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh guru itu sendiri menunjukkan betapa sistem pendidikan inklusi belum benar-benar dipersiapkan dengan baik. Apalagi sistem kurikulum pendidikan umum yang ada sekarang memang belum mengakomodasi keberadaan anak-anak yang memiliki perbedaan kemampuan (*difabel*). Kondisi ini jelas menambah beban tugas yang harus diemban para guru yang berhadapan langsung dengan persoalan teknis di lapangan. Di satu sisi para guru harus berjuang keras memnuhi tuntutan profesi dan hati nuraninya untuk mencerdaskan seluruh anak didiknya, sementara di sisi lain para guru tidak memiliki keterampilan yang cukup untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa yang *difabel*. Situasi kelas seperti ini bukannya menciptakan sistem belajar yang inklusi, justru menciptakan kondisi eksklusifisme bagi siswa *difabel* dalam lingkungan kelas reguler. Jelas ini menjadi dilema tersendiri bagi para guru.

Kita tentu optimis program inklusi ini akan berhasil bila didukung oleh semua unsur penentu yang berkecimpung dalam dunia pendidikan, dan pelaksanaannya tidak setengah-setengah. Dengan demikian perbedaan tidak menyebabkan terhambatnya pendidikan bagi mereka yang membutuhkan bahkan semenjak dini usia. Berangkat dari pemikiran dan kenyataan tersebut, maka upaya untuk menggali dan menghimpun masalah yang dihadapi guru Taman Kanak-kanak dan kompetensi yang harus mereka miliki untuk menciptakan pembelajaran inklusi merupakan langkah pertama dan utama, sebagai bahan informasi dalam merumuskan strategi penerapan sistem pendidikan inklusi. Oleh karena itu penulis mencoba untuk mengetahui secara obyektif mengenai : **“Implementasi Pembelajaran Inklusi di Taman Kanak-kanak (Studi Kasus di TK Gita Kirti Jalan Karang Sari No.29 Bandung)”**.

B. Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalahnya adalah :

1. Kompetensi apa yang dimiliki oleh guru TK Gita Kirti dalam pelaksanaan pembelajaran inklusi?
2. Bagaimana implementasi pembelajaran inklusi di TK Gita Kirti?
3. Faktor-faktor apa yang menimbulkan hambatan pada pelaksanaan pembelajaran inklusi di TK Gita Kirti?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini adalah menelaah implementasi pembelajaran inklusi di TK Gita Kirti, karena penerapan sistem pendidikan inklusi perlu memperhatikan potensi sumber daya manusia atau tenaga pengajar yang betul-betul memahami konsep pendidikan inklusi. Selain itu hal tersebut dilakukan mengingat Taman Kanak-kanak memiliki karakteristik tersendiri, sehingga diperlukan upaya penyesuaian.

2. Tujuan Khusus

Secara operasional, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendeskripsikan kompetensi yang dimiliki oleh guru TK Gita Kirti dalam pelaksanaan pembelajaran inklusi.
2. Mendeskripsikan implementasi pembelajaran inklusi di TK Gita Kirti.
3. Mendeskripsikan masalah yang ditemui oleh guru TK Gita Kirti dalam pelaksanaan pembelajaran yang inklusi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari studi ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi pengembangan sistem pendidikan inklusi dalam lingkungan kontekstual Taman Kanak-kanak. Dengan dideskripsikannya masalah yang dihadapi guru dalam proses pembelajaran inklusi serta kompetensi yang harus

dimiliki guru dan implementasi pembelajaran inklusi di Taman Kanak-kanak, maka dapat dilakukan pengembangan sistem pendidikan inklusi dalam *setting* aplikasi di Taman Kanak-kanak.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan data masukan tentang permasalahan yang dihadapi oleh guru Taman Kanak-kanak sehubungan dengan program sosialisasi sistem pendidikan inklusi.
- b. Dapat dijadikan data kajian bagi para administrator pendidikan tentang pola pengembangan sistem pendidikan inklusi dalam lingkungan kontekstual Taman Kanak-kanak.
- c. Dapat dijadikan bahan masukan bagi pihak Taman Kanak-kanak dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan sistem pendidikan inklusi.
- d. Dapat dijadikan bahan masukan bagi guru Taman Kanak-kanak untuk lebih memahami konsep pendidikan inklusi.
- e. Dapat memberikan masukan bagi penulis dalam menekuni disiplin ilmu Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia dini yang didalamnya mencakup keberagaman anak didik yang tentunya perlu mendapatkan perhatian.